



PENGENDALIAN INFLASI KOMODITAS PANGAN MENJELANG BULAN RAMADHAN

T. Ade Surya*)

Abstrak

Inflasi menjelang bulan Ramadhan, Mei 2015, mencapai 0,5 persen. Nilai ini di luar prediksi pemerintah. Salah satu yang memicu tingginya inflasi bulan Mei adalah kenaikan harga cabai merah akibat defisit produksi. Untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan mengendalikan tingkat inflasi, pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan peningkatan produksi. Faktor lain yang turut mempengaruhi stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi adalah proses distribusi, kebijakan baru harga BBM, dan adanya para penimbun atau spekulan. Pemerintah diharapkan lebih serius dan konsisten melakukan upaya-upaya preventif agar harga komoditas pangan dan tingkat inflasi dapat terjaga menjelang bulan Ramadhan.

Pendahuluan

Inflasi pada bulan Mei 2015 melonjak melebihi perkiraan sejalan dengan kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadhan. Kelompok bahan makanan dan makanan jadi, yang sebagian besar termasuk komponen bergejolak (*volatile foods*), memberi kontribusi yang cukup tinggi terhadap laju inflasi tersebut. Komoditas pangan pokok, yaitu beras, pada periode yang sama menyumbang deflasi sebesar 0,04 persen yang disebabkan meningkatnya produksi beras. Namun begitu, hal ini tetap tidak mampu mengompensasi lonjakan harga komoditas pangan lainnya. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada bulan Mei 2015 melesat menjadi 0,5 persen setelah melaju 0,36 persen di bulan sebelumnya. Tingkat inflasi menjelang

bulan Ramadhan pada tahun ini merupakan tingkat inflasi paling tinggi di antara tingkat inflasi menjelang bulan Ramadhan lainnya dalam 5 tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Akibat akselerasi kenaikan harga pangan pada bulan Mei menjelang Ramadhan, inflasi secara tahunan kembali menanjak menjadi 7,15 persen dari 6,79 persen pada bulan sebelumnya, sehingga semakin jauh dari target laju inflasi tahunan dalam APBN-P 2015 yang sebesar 5 persen.

Kepala BPS, Suryamin, menyatakan bahwa penyebab utama tingginya inflasi pada bulan Mei 2015 disebabkan kenaikan harga cabai merah sebesar 22,22 persen, yang memberi andil 0,10 persen terhadap total inflasi. Kenaikan harga cabai merah terjadi di 61 kota indeks harga konsumen

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: teuku.surya@dpr.go.id



Tabel 1. Tingkat Inflasi Menjelang Bulan Ramadhan Periode 2010 - 2015

Tahun	Juni 2010	Juni 2011	Juni 2012	Juni 2013	Mei 2014	Mei 2015
Tingkat Inflasi	0,29	0,12	0,07	-0,03	0,16	0,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

(IHK) dari total 82 kota IHK. Tingginya inflasi bulan Mei juga diakibatkan naiknya harga daging ayam ras dengan andil 0,06 persen terhadap total inflasi. Secara keseluruhan, komoditas pangan lainnya yang memberikan andil cukup besar terhadap tingginya inflasi bulan Mei 2015 adalah telur ayam ras sebesar 0,04 persen, bawang merah 0,03 persen, bawang putih dan ikan segar masing-masing 0,02 persen, serta tomat, cabai rawit, sawi hijau, dan cabai hijau masing-masing 0,01 persen.

Meningkatnya sebagian besar harga komoditas pangan yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi menjelang bulan Ramadhan memang bukan hal baru, karena permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok terutama pangan selalu meningkat setiap menjelang bulan Ramadhan. Dengan demikian, hal yang terus terjadi secara berulang dan dapat diprediksi seperti ini sudah seharusnya dapat dikendalikan lebih baik lagi oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan harga komoditas pangan perlu dipertanyakan lebih lanjut. Selain itu, sejauh mana faktor-faktor lain yang ikut menyebabkan harga komoditas pangan sulit dikendalikan oleh pemerintah, juga menarik diulas.

Upaya Pengendalian Harga Komoditas Pangan

Pemerintah dalam upaya mengendalikan harga komoditas pangan telah melakukan beberapa langkah preventif, seperti meningkatkan produksi beras sebagai bahan pangan utama masyarakat. Terkait ketersediaan beras pada tahun ini, melalui Kementerian Pertanian, pemerintah telah menegaskan bahwa pasokan beras di dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan bulan Ramadhan.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa luas tanam padi pada musim tanam rendeng (musim tanam pada saat musim penghujan) naik menjadi 8,44 juta hektar dibandingkan dengan periode yang sama pada musim rendeng sebelum

tahun sebelumnya yang sebesar 8,15 juta hektar. Tambahan luas tanam tersebut membuat panen padi hingga saat ini naik 1,5 juta ton gabah kering giling (GKG) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa produksi padi yang dihasilkan dari musim tanam Oktober 2014–Maret 2015 diproyeksikan mencapai 43,2 juta ton GKG. Keberhasilan meningkatkan produksi beras dan menambah luas tanam padi dilakukan melalui program-program upaya khusus Kementerian Pertanian. Beberapa program upaya khusus tersebut selain menyalurkan pupuk adalah perbaikan irigasi, optimasi lahan, dan pemberian bantuan traktor.

Sementara untuk komoditas pangan lainnya seperti cabai dan bawang merah, pemerintah menyatakan bahwa secara nasional produksi cabai dan bawang merah sangat mencukupi bahkan surplus, terutama pada saat musim kemarau. Produksi tahunan Indonesia untuk cabai mencapai sekitar 1,378 juta ton dari kebutuhan konsumsi dalam negeri yang sebesar 800 ribu ton. Sedangkan produksi tahunan Indonesia untuk bawang merah mencapai sekitar 1,050 juta ton dari kebutuhan konsumsi dalam negeri yang sebesar 935 ribu ton. Namun, karena cabai dan bawang merah merupakan produk musiman dan belum ada pengaturan pola tanam, maka pada bulan-bulan tertentu akan mengalami defisit produksi sehingga ketika kebutuhannya meningkat seperti pada saat menjelang bulan Ramadhan, produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini yang kemudian menyebabkan harga cabai dan bawang merah seringkali bergejolak atau melambung pada bulan-bulan tertentu.

Untuk mengatasi melonjaknya harga cabai dan bawang merah menjelang bulan Ramadhan, pemerintah berencana melakukan impor kedua komoditas pangan tersebut, dan saat ini pemerintah sedang mengkalkulasi jumlah produksi dan jumlah kebutuhannya untuk menentukan jumlah yang harus diimpor. Akan tetapi,

opsi ini sebenarnya tidak perlu diambil oleh pemerintah jika pemerintah mampu mengatur produksi melalui pengaturan pola tanam dan pengamanan stok. Terlepas dari hal ini, jika pada akhirnya kebijakan impor cabai dan bawang merah diberlakukan, pemerintah harus memperhatikan masa panen untuk kedua komoditas pangan tersebut. Dengan demikian, pemerintah akan terhindar dari jebakan impor di saat cabai dan bawang merah memasuki masa panen karena dampaknya akan menekan harga kedua komoditas tersebut di pasaran dan pada akhirnya merugikan petani.

Selain dengan upaya peningkatan kapasitas produksi dan impor untuk mengendalikan kestabilan harga komoditas pangan, pemerintah juga akan meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mewajibkan seluruh pemerintah provinsi untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inpres ini sendiri adalah hasil dari rapat koordinasi nasional (rakornas) VI TPID se-Indonesia akhir bulan lalu. Inpres tersebut, dalam kondisi seperti ini semakin mendesak untuk diterbitkan menjelang bulan Ramadhan.

Pemerintah Pusat akan membantu pembiayaan semua TPID Provinsi dengan anggaran senilai Rp50–Rp60 miliar per tahun untuk masing-masing provinsi. Selama ini, tidak semua provinsi memiliki TPID karena keterbatasan anggaran daerah dan kurangnya perhatian serta pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya stabilisasi harga. Padahal kehadiran TPID di tiap-tiap provinsi sangat penting dalam rangka pemetaan permasalahan di tiap-tiap daerah dan penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.

Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas pangan dan menjaga tingkat inflasi menjelang bulan Ramadhan sebenarnya sudah cukup baik. Sampai saat ini, pemerintah masih terus fokus menyediakan pasokan komoditas pangan yang rentan terhadap inflasi agar harga tetap stabil. Hal ini bersifat mandatoris sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Undang-Undang tersebut, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengelolaan cadangan dan distribusi pangan

pokok menjadi tugas pemerintah. Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah menjelang bulan Ramadhan ini belum mampu mengendalikan tingkat inflasi sepenuhnya. Oleh karena itu, beberapa faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan tingkat inflasi komoditas pangan perlu disasar pemerintah.

Faktor-Faktor Lain Penyebab Inflasi Tidak Terkendali

Inflasi komoditas pangan yang tidak terkendali tentunya tidak hanya disebabkan oleh kurangnya produksi komoditas pangan itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Faktor tersebut di antaranya proses distribusi berjalan kurang baik yang ditandai dengan disparitas harga antarwilayah dan antarmusim yang relatif tinggi, serta fluktuasi harga yang tidak terkendali. Permasalahan pada proses distribusi diakibatkan oleh sarana dan prasarana distribusi yang kurang memadai, kondisi geografis yang berpulau-pulau, sentra produksi yang tidak merata, koordinasi pelaksanaan distribusi yang belum lancar, margin distribusi yang tidak proporsional, aneka pungutan liar, dan posisi dominan pihak tertentu.

Sistem distribusi dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu: (1) mampu menyampaikan hasil-hasil dari produsen ke konsumen dengan biaya serendah-rendahnya; dan (2) mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan distribusi komoditas tersebut. Distribusi berperan penting agar komoditas yang diproduksi produsen dan diinginkan konsumen tersedia dan diperoleh dalam bentuk, waktu, dan jumlah yang tepat. Hal inilah yang sangat sulit diwujudkan secara konsisten oleh pemerintah dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi komoditas pangan.

Faktor lainnya terkait dengan naik turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rentang waktu yang cukup singkat. Kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menerapkan skema subsidi tetap untuk solar dan minyak tanah, serta mencabut subsidi untuk premium memberi andil yang tidak sedikit terhadap fluktuasi harga komoditas

pangan. Harga jual BBM dengan skema yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap biaya transportasi dan logistik proses distribusi komoditas pangan.

Faktor terakhir yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah adanya spekulasi yang menimbun komoditas pangan sehingga harganya dapat meningkat tajam. Tindakan spekulasi ini biasanya justru dilakukan ketika permintaan akan komoditas pangan mengalami kenaikan, seperti saat menjelang bulan Ramadhan dan hari-hari besar lainnya. Oleh karena itu, walaupun pemerintah berusaha sekuat tenaga mengendalikan inflasi dengan menjaga kestabilan harga, peningkatan inflasi dan harga komoditas pangan sering sekali jauh di atas prediksi pemerintah.

Di beberapa peraturan perundang-undangan telah terdapat pengaturan yang tegas berupa sanksi bagi penimbun pangan pokok. Namun, terjadi disharmoni antara UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU tentang Pangan menyebutkan bahwa pelaku usaha pangan yang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal akan dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp100 miliar. Sementara itu, UU tentang Perdagangan juga menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 miliar.

Penutup

Pemerintah harus terus berupaya untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan terutama menjelang bulan Ramadhan. Jika harga-harga komoditas pangan semakin tidak terkendali, daya beli masyarakat akan turun. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas nasional. Upaya penting yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas komoditas pangan melalui penerapan teknologi maju.

Pemerintah juga harus mengatasi faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut memengaruhi tingkat inflasi dan fluktuasi harga komoditas pangan. Hal ini harus dilakukan secara serius dan konsisten agar harga-harga komoditas pangan tidak melonjak naik di saat kebutuhan cukup tinggi, baik itu menjelang bulan Ramadhan maupun di masa-masa mendatang.

DPR RI harus mengawasi kebijakan dan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga kestabilan harga komoditas pangan. Selain itu, DPR RI pun perlu mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam meningkatkan produksi komoditas pangan agar tingkat inflasi dapat terus terkendali sehingga target pemerintah untuk mencapai inflasi tahunan sebesar 5 persen dapat terealisasi.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- “Distribusi Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadan”, *Harian Media Indonesia*, 4 Juni 2015.
- “Kendali Ketat Inflasi Dinantikan”, *Harian Media Indonesia*, 4 Juni 2015.
- “Ketersediaan Pangan Dijamin”, *Harian Kompas*, 4 Juni 2015.
- “Produksi Gabah Capai 43,2 Juta Ton”, *Harian Bisnis Indonesia*, 4 Juni 2015.
- “Pangan Jadi Penyebab”, *Harian Bisnis Indonesia*, 3 Juni 2015.
- “Data Bicara bahwa Indonesia Sudah Swasembada Cabai dan Bawang Merah”, <https://www.selasar.com/ekonomi/data-bicara-bahwa-indonesia-sudah-swasembada-cabai-dan-bawang-merah>, diakses tanggal 9 Juni 2015.
- “Jelang Ramadan, Mendag Segera Impor Sapi, Cabai, & Bawang”, <http://industri.bisnis.com/read/20150603/12/439887/jelang-ramadan-mendag-segera-impor-sapi-cabai-bawang>, diakses tanggal 5 Juni 2015.
- “Si Pedas' Penyebab Inflasi Mei 0,50 Persen”, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/01/087671285/si-pedas-penyebab-inflasi-mei-0-50-persen>, diakses tanggal 3 Juni 2015.